

IDENTITAS KEAGAMAAN MINORITAS MUSLIM SINGAPURA

Toto Tohari

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Abstract

Singapore is a secular country where the majority of the population is of ethnic Chinese descent, until now it has changed the face of Singapore into a developed country in Southeast Asia. The Malay ethnic group, which was originally the majority ethnic group inhabiting Singapore, had to shift to becoming a second-class ethnic group with a population of around 14%. Singapore's policy of making it a secular state has had an impact on the minority of Singaporeans, including Singaporean Muslims who are an ethnic minority. Various policies have provided a short space to carry out their religious expression, from starting worship, wearing religious symbols to living in crowds, their space for movement is limited. As a Muslim minority in the country, they do not get the breadth and independence in carrying out religious activities. In the latest case, one of the preachers or speakers from Indonesia, namely Ustad Abdul Somad Lc., M.A., Ph.D. Experiencing rejection when going to visit Singapore on 16 May 2022. The reason for the refusal was conveyed directly by the Singapore Ministry of Home Affairs K Shanmugam, namely that his party does not tolerate various forms of hate speech and divisive ideology.

Keywords: Religious Identity, Muslim Minority, Singapore.

Abstrak

Singapura merupakan negara sekuler yang mayoritas penduduknya keturunan etnis Tionghoa, hingga saat ini telah merubah wajah Singapura menjadi negara maju se-Asia Tenggara. Etnis Melayu yang pada awalnya merupakan etnis mayoritas yang mendiami Singapura harus bergeser menjadi etnis kelas kedua dengan jumlah populasi sekitar presentasi 14%. Kebijakan Singapura yang menjadikan sebagai negara sekuler telah memberikan dampak kepada minoritas warga Singapura tidak terkecuali kepada muslim Singapura yang merupakan etnis minoritas. Berbagai kebijakan telah memberikan ruang yang pendek untuk melakukan ekspresi keagamaannya dari memulai beribadah, memakai simbol keagamaan sampai hidup berkerumun pun dibatasi ruang geraknya. Sebagai minoritas muslim di negara tersebut kurang mendapatkan keluasan dan kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Dalam kasus terbaru salah satu dai atau penceramah yang berasal dari Indonesia yaitu Ustad Abdul Somad Lc., M.A., Ph.D. Mengalami penolakan saat akan berkunjung ke Singapura 16 Mei 2022. Alasan penolakan disampaikan langsung oleh Kemendagri Singapura K Shanmugam, yaitu pihaknya tidak menoleransi berbagai bentuk ujaran kebencian dan ideologi memecah belah.

Kata Kunci: Identitas Keagamaan, Minoritas Muslim, Singapura.

Copyright (c) 2022 Toto Tohari.

✉ Corresponding author : Toto Tohari
Email Address : tototohari@uhamka.ac.id

PENDAHULUAN

Singapura merupakan negara maju yang berlokasi di Asia Tenggara, dengan luas wilayahnya sekitar 697 km², telah memainkan peran penting dalam perdagangan berskala internasional. Negara ini penduduknya berjumlah sebanyak 5.781.728 jiwa, yang notabenehnya penduduk mayoritas asli Singapura dari suku Melayu (identik muslim), namun kini yang menjadi mayoritas dihuni oleh etnis Cina/Tionghoa akibat dari migrasi yang mendatangkan penduduk etnis Tionghoa secara besar besaran yang dilakukan oleh penjajah Inggris terutama untuk jumlah penduduk pengelolaan perkebunan seperti kebun karet dan sebagainya. Singapura merupakan negara bekas jajahan kolonial Inggris. Pada 1963 Singapura meninggalkan persemakmuran Inggris dan bergabung menjadi bagian dari federasi Malaysia, hanya bertahan sampai dua tahun, kemudian pada 1965 Singapura memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan sekaligus resmi melepaskan diri dari federasi Malaysia. Akhirnya Singapura telah menjadi negara yang berdaulat dan menyatakan negara yang merdeka bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1965. Selanjutnya dijadikan sebagai hari merdeka Singapura dan momen itu bertepatan dengan melepaskan diri dari federasi Malaysia.

Singapura telah menjadi negara maju di dunia (*a first world economic power*) dilihat dari pendapatan perkapitanya yang begitu tinggi yakni sebesar USD. 87.100,- dengan ditambah oleh pendapatan Domestik Bruto Nominal (PDB Nominal) yaitu sebesar USD. 487,9 miliar, sehingga Singapura masuk ke dalam salah satu negara terkaya di Asia dan Dunia. Sektor di bidang perekonomian

dan teknologi industri yang menjadi tulang punggung Singapura antara lain pada sektor pengolahan barang ekspor-impor produk elektronik dari industri manufaktur, sektor pengolahan minyak bumi, perkapalan, bahan kimia, pengolahan makanan, pengolahan karet, perbaikan kapal, pariwisata, jasa keuangan dan perbankan dan yang lain-lainnya seperti pengelolaan pelabuhan lintas kapal.

Singapura menganut asas pemerintahan Republik Parlemeter dengan kepala negaranya seorang Presiden. Dalam pemilihan presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyatnya dalam kurun 6 tahun sekali. Sedangkan Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri (PM) yang dipilih langsung oleh parlemeter dalam kurun 5 tahun sekali dengan melalui pemilihan umum parlemen yang juga bertanggung jawabannya langsung kepada parlemen. Maka sistem pemerintahan di Singapura yaitu dengan sistem demokrasi parlemen memakai model *westminder*. Sampai saat ini yang mendominasi perpolitikan di Singapura masih dikuasi oleh *People's Action Party* (PAP), sejak mulai pemilihan umum tahun 1959 dengan Perdana Menteri Singapura saat itu Lee Kuan Yew. Hingga sampai sekarang PAP (*People's Action Party*) telah menjadi partai satu satu yang menguasai selalu memenangkan dalam pemilihan umum di Singapura. Menariknya walaupun Singapura sebagai negara sekuler dan republik totalitarian dalam sistem pemerintahan, negara tersebut menjadi negara yang paling bersih dari praktik korupsi di Asia, Sehingga negara ini masuk pada 10 negara yang bebas dari korupsi di dunia menurut versi *Transparency International*.

Bahkan penilaian dari pemerintahan Bank Dunia terhadap Singapura memberikan penilaian yang baik dalam aturan hukum, pencegahan korupsi yang efektif oleh pemerintahan. Namun bila berbicara mengenai kebebasan sipil hak politik serta hak asasi manusia masih kurang mendapatkan iklim demokrasi. Terdapat empat bahasa resmi negara Singapura yaitu Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil sebagai alat komunikasi masyarakat Singapura yang heterogen dan multicultural. Secara demografi presentase jumlah penduduk Singapura saat ini sebagai berikut:

No	Etnis	Persentasi
1	Cina/Tionghoa	74,1%
2	Melayu	13,4%
3	India	9,2%
4	Arab, Pakistan, dll	3,3%

Secara jumlah penduduk Singapura, presentase berdasarkan pemeluk agama sebagai berikut:

No	Pemeluk Agama	Persentasi
1	Buddha	33 %
2	Kristen	18 %
3	Tanpa Agama	17 %
4	Islam	15 %
5	Tao & Khonghucu	11 %
6	Hindu	5,1 %
7	Lain-lainnya	0,9 %

Singapura yang awalnya menginduk pada Kesultanan Malaka. Kini telah menjadi negara sekuler, di mana negara telah netral dalam persoalan agama, sehingga agama menjadi ramah pribadi atau kelompok. Negara tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur keyakinan setiap individu. Namun negara memproteksi (melindungi) semua agama yang ada di Singapura dengan memberikan penekanan dan pembatasan terhadap hal hal tertentu, seperti melarang paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.

Dalam hal ini pemerintah Singapura melalui George Yeo sebagai Menteri Informasi, Komunikasi dan Seni memberi penegasan bahwa "*Singapore's government is secular, but it is certainly not atheistic*". Menurut Lily Zubaidah Rahim, sekulerisme di Singapura merupakan langkah strategis pemerintah dengan menyatakan Singapura adalah negara sekuler tetapi tidak berarti atheis (tidak bertuhan) karena sekitar 80% masyarakat Singapura beragama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menyajikan data dengan langkah pengumpulan informasi melalui secara *virtual ethnography*, yaitu mengamati pergerakan dan perkembangan wacana minoritas muslim di Singapura. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data melalui studi literatur untuk memperkaya data akademik. Oleh karena itu, langkah dengan cara *virtual ethnography* dan studi literatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan tulisan ini. Penulis mencoba menyampaikan teori yang cukup relevan dengan kasus yang terjadi yaitu sebuah prinsip moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, kekurangan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman.

Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Hemat penulis yaitu sebuah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan. Indikator moderasi beragama yang akan digunakan ada empat hal komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Muslim Singapura menjadi minoritas, pada Abad ke 19, Singapura telah menjadi salah satu pusat Islam terpenting di Asia Tenggara. Karena Singapura memiliki keunggulan sebagai pintu masuk jalur perdagangan internasional menuju Eropa, Timur Tengah, Australia dan Timur jauh. Bahkan menurut Helmiati mengutip dari Azyumardi Azra, menyebutkan di samping sebagai tempat transit perdagangan, Singapura memiliki posisi yang strategis karena menjadi pusat (*center*) informasi dan komunikasi dalam penyebaran dakwah Islam pada masa kejayaan Kesultanan Malaka sehingga muslim Singapura menjadi mayoritas pada saat itu, sebelum penjajahan kolonial Eropa (Inggris) datang ke Singapura awal Abad ke-20 (Azyumardi Azra, 1994: 203,

271). Semenjak kolonial datang ke Singapura, maka perlahan-lahan kesultanan Malaka memudar, melemah dan berakhir. Sementara itu kolonial (Inggris) semakin berkuasa dan kokoh. Akhirnya berkat jasa kolonial Singapura memisahkan diri dari bagian negara federasi Malaysia dan menjadi negara yang berdaulat, republik yang merdeka 1965.

Berbicara Melayu maka identik dengan muslim. Saat ini muslim Melayu 14,1% setara dengan 380.600 orang, dengan perincian Pendidikan Dasar 32,7 %, SMP 47,3%, SMA 3,5%, Perguruan Tinggi 1,4%, pendidikan non formal 15,1%. Dalam bidang pekerjaan masyarakat muslim berprofesi pada sektor teknik dan profesional 9,7%, pada sektor administrasi dan managerial 1,1%, yang menjadi ulama dan guru agama/profesi keagamaan 15,4%, sales dan servis 14,0%, pertanian dan nelayan 0,3%, produksi dan relasi 57%, lain-lain 2,5%. Dalam hal partisipasi pekerja laki-laki 78,3% dan pekerja perempuan 47,3%. Singapura sebagai negara sekuler, tidak memberikan tekanan dalam urusan agama terutama kepada muslim, meskipun mayoritas warga Singapura keturunan etnis Tionghoa dengan memeluk agama Buddha dan sebagian lain lagi memeluk agama Kristen dan Khunghucu. Sedangkan muslim dan Melayu Singapura menempati urutan yang kedua.

Melalui kebijakan (*regulasi*) yang dikeluarkan pemerintah telah memberikan dampak yang mengekang kepada muslim Singapura, seperti pelarangan mengeraskan (*loud speaker*) suara adzan ke publik, padahal fungsi adzan sebagai pengingat dan memanggil umat muslim untuk menunaikan shalat. Adapun alasan pelarangan mengeraskan suara adzan agar non Islam etnis Tionghoa yang mayoritas dan juga pemeluk agama selain Islam tidak terganggu. Kebijakan lain dari pemerintah yang mengekang umat Islam Singapura adalah pelarangan menggunakan jilbab kepada siswa muslim di sekolah-sekolah pemerintah (negeri). Kebijakan pelarang memakai jilbab bagi siswa muslim ini disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong kepada komunitas muslim. Ia mengatakan *Hijab was not part of the school uniforms and effectively banned in institutions of learning*/Jilbab bukan bagian dari seragam sekolah dan secara efektif dilarang di lembaga pendidikan. Pada saat diwawancarai oleh *Malay Newspaper* berita harian. Bahkan putra Perdana Menteri, Lee Kuan Yew menegaskan bahwa pelarang jilbab bagi siswa di sekolah negeri dengan maksud memelihara dan menjaga integrasi serta keharmonisan sosial. Bagi pemerintah jilbab adalah simbol agama tertentu jika diijinkan memakai jilbab di sekolah negeri maka akan mengganggu keharmonisan dan integrasi nasional. Pelarangan yang lainnya untuk muslimah di negara tersebut yang bekerja di pelbagai lembaga milik pemerintah seperti rumah sakit, klinik, sekolah dan lainnya yaitu adanya larangan untuk pegawai muslimah memakai atau menggunakan jilbab saat sedang bekerja.

Di samping itu, ada kebijakan dari pemerintah yang memberlakukan untuk tinggal di perumahan yang sudah disediakan oleh pemerintah, secara hakikat ini telah melemahkan muslim di sana. Kita bisa telusuri sebelum ada kebijakan pemerintah untuk tinggal di rumah susun milik pemerintah, muslim (Melayu) Singapura tinggal di kampung tradisional yang homogen (satu etnis) sehingga mereka dapat mengamalkan dan menegakan syariat Islam secara leluasa menjalankan ajaran agama dengan berjamaah, hidup penuh dengan tolong menolong, penuh dengan kebersamaan, dan juga kuat dalam

mempererat tali silaturahmi. Sejak pemerintah Singapura memberlakukan urbanisasi dan migrasi global, maka pemerintah membuat kebijakan baru dengan membangun tempat tinggal seperti perumahan/rumah susun/apartemen milik pemerintahan sehingga perkampungan yang di tempati oleh muslim Singapura dikosongkan dan semua warga muslim direlokas/pindahkan untuk tinggal bersama di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Umat muslim Singapura yang dulu hidupnya homogen, sekarang harus hidup membaaur dengan berbagai etnis dan pemeluk agama lain, sehingga ini berdampak pada melemahnya ajaran agama karena tidak dilakukan secara berjamaah, melemahnya tolong menolong di antara mereka dan melemahnya tali silaturahmi, di antara sesama muslim Singapura, sehingga secara politik umat Islam Singapura menjadi lemah karena menempati tiap perumahan/rumah susun/apartemen hanya diberlakukan 15% dari jumlah keseluruhan untuk komunitas muslim, selebihnya dialihkan ke tempat tinggal yang lainnya.

Sebagai wadah dalam melakukan aktivitas keagamaan seperti menampung aspirasi umat muslim untuk disampaikan ke pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan keagamaan maka muslim Singapura yang tergabung pada *The Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang didirikan pada masa kolonial Inggris, pada 1966 menyerukan dan merekomendasikan agar muslim Singapura mendirikan organisasi keagamaan yaitu Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) - *Islamic Religious Council of Singapura*, organisasi Muslim Singapura ini sifatnya independen dan telah diberi legitimasi (diakui) oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Majelis ini diakui dan dianggap sebagai perwakilan muslim Singapura yang resmi dalam memberikan rekomendasi atau saran dan masukan kepada pemerintah untuk kepentingan muslim Singapura dan juga kerajaan.

Singapura sudah menjadi negara maju yang telah memberikan dampak perubahan besar pada prilaku dan gaya hidup masyarakatnya, tidak terkecuali juga pada kehidupan masyarakat beragama yang semakin modern telah mendorong kelompok umat beragama termasuk kelompok minoritas muslim di Singapura dalam merespons persoalan kehidupan yang semakin kompleks dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga muslim Singapura pun perlu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu keberadaan MUIS sangat diperlukan dan memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis bagi kepentingan minoritas muslim Singapura, terutama mengenai masalah-masalah yang keagamaan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti kehalalan makanan, tempat ibadah, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, zakat, wakaf dan sebagainya yang perlu untuk dikoordinir dan sampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari aktivisme keagamaan. Meskipun saat ini telah banyak berdiri lembaga, institusi, badan, yang berkaitan dengan Islam seperti Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Singapura (PERGAS) yang berfokus dan berkonsentrasi pada bidang pendidikan. Selain PERGAS ada juga organisasi Persatuan Pelajar Agama Dewasa Singapura (PERDAUS) bergerak di bidang pendidikan Islam dengan tujuan pengajaran dan pendidikan agama.

Meskipun banyak organisasi sosial keagamaan muslim Singapura, namun yang diberi otoritatif oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas fungsi fungsi keagamaannya yaitu MUIS, peran yang strategis dilaksanakan oleh MUIS

yaitu berkaitan dengan urusan peribadatan, hukum (fatwa), perekonomian, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan Islam di Singapura. Selain itu MUIS diberi kepercayaan dan tugas oleh pemerintah Singapura untuk memainkan peran mengelola mengenai keumatan seperti:

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai masalah masalah yang berkaitan dengan agama Islam (umat muslim Singapura)
2. Mengurusi persoalan yang berkaitan dengan agama Islam, kaum muslim (umat), termasuk pengelolaan urusan haji serta sertifikasi halal (makanan minuman, obat-obatan, kosmetik dll yang halal)
3. Mengelola wakaf dan dana umat muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah
4. Mengelola pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam rangka mendukung mensyiarkan agama Islam dan untuk kepentingan umat Islam di Singapura.
5. Mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura.

MUIS sebagai Badan Independen umat Islam Singapura, telah ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan kepada berbagai masjid supaya memiliki kurikulum pendidikan agama yang telah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan di Singapura, kemudian berkaitan dengan pengurusan pernikahan, zakat, wakaf, kurban, haji, dan yang lainnya mengenai persoalan agama harus sesuai dengan aturan negara. Hal yang menarik di Singapura yang berkaitan dengan ceramah keagamaan umat Islam, MUIS diberikan peran oleh pemerintah untuk memastikan isi khutbah atau ceramah harus sesuai dengan aturan pemerintah yang mengedepankan toleransi dan inklusif (terbuka) dengan melihat masyarakat Singapura yang majemuk, maka para penceramah yang datang dari luar Singapura wajib lapor mengurus perizinan untuk aktivitasnya kepada MUIS.

Singapura terkenal dengan sistem pendidikannya yang telah mengalami perkembangan yang pesat, seperti kurikulum, mata pelajaran, termasuk juga sistem pembelajarannya. Sistem pendidikan di Singapura menitik beratkan pada penguasaan pada bidang Teknologi Informasi yang ditunjang dengan pendidikan karakter sebagai bagian dari budaya yang tinggi dalam hal lingkungan pendidikan dengan mengedepankan etos kerja keras, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Singapura sangat dikenal dengan salah satu negara yang paling baik mutu pendidikannya seperti adanya perguruan tinggi yang berkelas, misalnya, *National University of Singapore* (NUS) merupakan universitas terbaik se-Asia Tenggara dengan urutan peringkat ke-3 dan peringkat ke-30 di dunia. Kesuksesan pendidikan di Singapura merupakan kerja keras dari pemerintah yang mengedepankan mutu kualitas pendidikan. Orang tua siswa muslim banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah milik pemerintah (negara) walaupun biayanya cukup besar tetapi mereka tetap menyekolahkan karena pendidikan di sekolah tersebut memiliki kualitas tinggi dengan mengedepankan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi informasi.

Adapun masjid yang ada di Singapura selain untuk beribadah, meskipun secara non formal masjid sebagai tempat untuk mendapatkan

pendidikan agama Islam. Memang fungsi masjid yang utama adalah untuk ibadah seperti shalat, tadarus, pengajian, namun masjid sebagai tempat belajar agama, diskusi, pembangunan sosial umat, pengembangan syiar, dakwah Islam, dan sebagai tempat pertemuan (silaturahmi), sehingga memfungsikan masjid seperti masa Rasulullah. Hingga saat ini, di Singapura terdapat 70 masjid, salah satunya masjid Sultan sebagai daya tarik wisata di negeri tersebut.

Pada 2018 silam, kejadian serupa juga terjadi tepatnya dialami oleh dua pengkhotbah yaitu Lou Engle (Kristen) dari Amerika Serikat dan Yusuf Estes (Islam) dari Kuala Lumpur. Pemerintah Singapura melarang kunjungan karena sejumlah pernyataannya yang bertentangan dengan nilai-nilai Singapura yang multiras dan multi-agama. Adapun dalam kasus dai dari Indonesia yaitu Ustadz Abdul Somad Lc.,M.A., Ph.D. Ditolak masuk karena beberapa alasan. Pertama dinilai menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Singapura. Kedua, menyampaikan adanya operasi syahid dalam konteks konflik Israel-Palestina. Ketiga, diksi atau pemilihan kata yang digunakan mengandung multitafsir, misalnya menyebut non-muslim sebagai kafir dan salib kristen sebagai tempat jin(roh/setan).

Kemudian ia menegaskan bahwa ia beserta rombongan bukan berkunjung karena ada acara pengajian atau tabliq akbar, melainkan hanya libur keluarga pada umumnya. Sayangnya, petugas Bandara tidak menjelaskan secara rinci alasan ditolaknya di negeri Singapura tersebut. Pemerintah Singapura mengklaim bahwa Abdul Somad berpura-pura melakukan kunjungan sosial ke negara itu untuk mendoktrin masyarakat menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Penting untuk kedepannya melakukan penelaah yang lebih komprehensif atas hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan atas minoritas. Dalam studi tentang minoritas dan negara, Barth menyebut konsep *minority regime* di mana bagian dari perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, terdapat instrumen hukum dasar yang menjadi rujukan bagi upaya tersebut. Masyarakat harus paham bahwa agama minoritas sudah dijamin oleh pasal 27 dari Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik atau *International Covenant on civil and Political rights* (ICCPR). Alasan dasar yaitu paradigma berpikir tentang agama yang diskriminatif.

Posisi agama di dua ruang yaitu publik dan privat. Sepanjang masyarakat pahami, agama tidak hanya mendakwahkan nilai-nilai yang berkaitan dengan soal kesalehan atau keselamatan individu akan tetapi hadir sebagai petunjuk bagi manusia untuk hidup di dunia.

KESIMPULAN

Keterlibatan minoritas Muslim Singapura dalam menjaga dan merawat kemajemukan telah dibuktikan dengan mengikuti segala aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan membentuk MUIS sebagai representasi umat Islam Singapura. Sebagai etnis minoritas kelas kedua yang hidup di negara sekuler secara keseluruhan muslim Singapura mendapatkan perlakuan yang sama dengan etnis minoritas yang lain. Hanya saja beberapa kebijakan yang terasa mengekang seperti pelarangan memakai jilbab bagi siswa muslim, dan

pelarangan mengeraskan suara adzan di masjid masjid yang ada di Singapura, serta memberi pengetatan kepada penceramah dari luar yang akan berceramah. Namun pada sisi yang lain, Islam di Singapura diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti yang lainnya, dapat bekerja di perusahaan milik pemerintah, serta menyekolahkan anak di sekolah negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiatul. (2018). *Pendidikan Islam di Singapura*, Vol. 1 No. 2.
- Ahmad Najib Burhani. (2019). *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Helmiati. (2013). *Dinamika Islam di Singapura: Menlisik Pengalaman Minoritas Muslim Singapura Sekuler & Multikultural*. Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama: UIN Suska, Vol 5 No 2.
- Bahtiar Effendy. (2009). *Agama Publik dan Privat'Pengalaman Islam Indonesia*. UIN Press.
- Husnatul, Lubna. (2018). *Masjid Sultan Sebagai Daya Tarik Wisata di Singapura*. Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata: Yogyakarta Ambarrukno.
- Ismatu Ropi. (2012). *Minoritas, Legal Jihad, dan Peran Agama*, Jurnal Maarif Institute For Culture and Humanity, Vol.7. No 1.
- Zubaidah Rahim, Lily. (2009). *Singapore in the Malay World Building & Breaching Regional Bridges*, London.
- Siddique. Sharon. (1995). *Being Muslim in Singapore: Change, Community and Consciousness, Conference on Islam and Society in Southeast Asia*. Singapore: April.
- Sudrajat, Ajat. *Perkembangan Islam Di Singapura*, Prodi Ilmu Sejarah FISE Universitas Negeri Yogyakarta
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta.
- John L. Esposito, dkk, (2012). *Moderat atau Radikal*. Jakarta.
- Wan Ali bin, WZ Kamaruddin & Zuhdi bin Ismail, Ahmad. (2017). *Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian terhadap Isu dan Tantangan Dakwah & Pemikiran Islam Era Globalisasi*. E-journal universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang), Wardah, Vol.18, No.1.
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Masjid+Sultan+sebagai+Daya+Tarik+Wisata+di+Singapura+oleh+Huswatul+Lubna&btnG=
- <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/18/02/23/p4klwp328-singapura-masuk-10-besar-negara-dengan-korupsi-terkecil>
- <https://manjakan.com/sistem-pemerintahan-singapura/#!>
- <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/62>
- <https://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>
- <https://www.muis.gov.sg/>
- <https://www.pergas.org.sg/about/>
- <https://perdaus.org.sg/>
- https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-61489347.amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIACAaw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=165391857344

78&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-61489347
<https://www.kompas.com/global/read/2022/05/22/213000470/bukan-hanya-uas-singapura-pernah-larang-masuk-2-penceramah-agama?page=all>